



Digital Receipt

This receipt acknowledges that Turnitin received your paper. Below you will find the receipt information regarding your submission.

The first page of your submissions is displayed below.

Submission author: Tanti Dewi Rastiti
Assignment title: Jurnal
Submission title: ALASAN AMERIKA SERIKAT MENARIK
File name: eJournal_Tanti_Dewi_Rastiti.docx
File size: 615.21K
Page count: 14
Word count: 4,875
Character count: 33,063
Submission date: 17-May-2021 01:50PM (UTC)
Submission ID: 1587748191

ORIGINALITY REPORT

21%

SIMILARITY INDEX



Wakil Dekan Bidang Akademik,

Dr. Phil I Ketut Gunawan, MA.
NIP. 19631222 199002 1 001

eJurnal Ilmu Hubungan Internasional, Vol. 9 No. 1, 2021

ISSN: 2477-2623

ALASAN AMERIKA SERIKAT MENARIK DIRI DARI JOINT COMPREHENSIVE PLAN OF ACTION (JCPOA) TAHUN 2018

Tanti Dewi Rastiti¹

Abstract

The research aims to explore the backgrounds of the United States withdrawal from the JCPOA. The analysis method used is explanatory research with secondary data. An approach that used in this research is International Regime Theory by Stephen D. Kravner. The results of this research shows that the backgrounds of the United States withdrawal from the JCPOA was due 4 reasons, first is the limited access of the IAEA to Iran's nuclear sites. Second, the JCPOA does not explicitly regulate the prohibition for Iran to develop weapons through nuclear energy. Third, the United States considers that JCPOA is to be more profitable for Iran. Fourth, the provisions of the sunset clauses that regulate the limits of the implementation of the JCPOA are not in accordance with the interests of the United States.

Keywords: United States, JCPOA, Iran, Nuclear

Pendahuluan

Keberadaan nuklir di dunia telah menjadi permasalahan karena dapat berdampak terhadap keamanan internasional. Dampak buruk keberadaan nuklir terlihat dari peristiwa bom atom di Hiroshima dan Nagasaki pada tahun 1945 (CND Briefing, 2017) dan ledakan reaktor nuklir di Chernobyl pada tahun 1986 (Yaziz Hasan, 2016). Pada tahun 2000an, IAEA selaku badan di bawah PBB yang mengawasi penggunaan energi nuklir di dunia kembali berhadapan dengan masalah pengembangan nuklir yang dilakukan oleh Iran. Pada tahun 2003, IAEA menyatakan telah menemukan fasilitas nuklir di Natanz (<https://missiledefenseadvocacy.org>). Sebagai negara yang meratifikasi NPT dan termasuk sebagai negara *Non-Nuclear Weapon State* (NNWS), kegiatan Iran tersebut telah melanggar *Statute Agency* IAEA mengenai *Agency Safeguards* pasal XII (C) yang berisi bahwa setiap negara harus melaporkan kegiatan nuklirnya kepada IAEA dimana apabila terjadi pelanggaran maka IAEA berhak melaporkannya kepada Direktur Jenderal yang kemudian melaporkan Dewan Gubernur (IAEA, 1989).

Setelah penemuan tersebut, IAEA menuntut Iran untuk menanggihkan kegiatan pengayaan uraninya dan segera memberikan laporan mengenai kegiatan pengembangan nuklirnya. Awalnya, Iran mematuhi tuntutan tersebut dengan menutup fasilitas nuklirnya di Natanz. Namun, pada Januari 2006, Iran kembali membuka fasilitas nuklir tersebut yang menimbulkan kecurigaan bahwa Iran sedang mengembangkan senjata nuklir (www.armscontrol.org). Kemudian, karena kembali melanggar dan tetap bersikeras untuk melakukan pengayaan uranium, akhirnya Dewan Keamanan PBB mengeluarkan Resolusi 1737 pada tahun 2006 dan Resolusi 1747 pada tahun 2007 yang menjatuhkan sanksi kepada Iran berupa embargo perdagangan bahan dan teknologi nuklir (*Ulu*).

Karena tidak kunjung melaksanakan tuntutan IAEA, akhirnya dibentuklah forum P5+1 yang beranggotakan 5 negara DK PBB yaitu Amerika Serikat, Rusia, Cina, Inggris, Prancis dan ditambah Jerman. Forum tersebut bertujuan untuk melakukan

¹ Mahasiswa Program S1 Hubungan Internasional, Fakultas Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mataraman. Email: tantidewirastiti@gmail.com